**PELAKSANAAN PROGRAM USAHA EKONOMI DESA-SIMPAN PINJAM
UED-SP Buluhcina Mandiri Di Kecamatan Siak Hulu
Kabupaten Kampar**

PENDAHULUAN

Dalam proses pembangunan yang dilakukan negara-negara di atas dunia, kemiskinan merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dan selalu diusahakan untuk diminimalisir, bahkan bila mungkin dihilangkan. Namun kenyataannya, kemiskinan masih selalu melekat dalam setiap sendi kehidupan masyarakat.

Kemiskinan adalah suatu kenyataan yang belum mampu dihilangkan dari Provinsi Riau. Berdasarkan data dari BPS dapat diketahui bahwa pada tahun 2006-2008 salah satu daerah yang memiliki penduduk miskin adalah Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar memiliki 20 daerah kecamatan dan setiap kecamatan memiliki daerah yang masih harus diperhatikan untuk pembangunan yang lebih baik. Salah satu daerah yang memiliki penduduk miskin adalah Kecamatan Siak Hulu. Hal ini juga diungkapkan dari hasil wawancara penulis dengan Camat Siak Hulu Syahrial Abdi AP, M, Si yang mengatakan bahwa : *“Kecamatan Siak Hulu memiliki 5 desa yang tergolong miskin dan salah satu desa yang termasuk termiskin di Siak Hulu adalah Desa Buluhcina”*.

Sebagaimana disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Kampar Periode 2007- 2011 bahwa kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah pembangunan yang sangat krusial untuk dipecahkan. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, Pemerintah Propinsi Riau bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kota Se-Propinsi Riau melaksanakan suatu program pemberdayaan masyarakat yang disebut dengan Usaha Ekonomi Desa Simpan-Pinjam (UED-SP).

UED-SP Buluhcina Mandiri merupakan lembaga keuangan mikro yang merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam Program Pemberdayaan Desa (PPD). Untuk pengembangan yang bersifat pemberdayaan, UED-SP Buluhcina Mandiri memiliki sistem manajemen dan struktur organisasi yang mengacu pada standarisasi

koperasi. Berdasarkan keputusan Kepala Desa Buluhcina No Kpts/93/PEM/BC/2008 yang disahkan oleh Bupati Kampar Nomor 412/BSPPM/65/2008 tanggal 08 September 2008 berfungsi sebagai lembaga keuangan desa untuk menyalurkan bantuan dana usaha melalui mekanisme penyaluran kredit dan penarikan dana usaha desa.

Pelaksanaan UED-SP Buluhcina Mandiri yang sudah berjalan lebih 2 tahun ditemukan fenomena yang menarik untuk diperhatikan seperti :

1. Munculnya fenomena keterlambatan dalam pengembalian dana UED-SP, Pertumbuhan anggota sejak berdirinya UED-SP Buluhcina memang berjalan agak lamban. Sedangkan untuk nilai tunggakan sampai 31 Desember 2009 adalah Rp 17.095.467,- (Tujuh belas juta sembilan puluh lima ribu empat ratus enam puluh tujuh) rupiah.
2. UED-SP adalah program yang diberikan oleh Pemerintah Propinsi Riau untuk membantu masyarakat miskin untuk pengembangan usaha namun masih ditemukan anggota UED-SP yang berasal dari keluarga yang memiliki ekonomi yang relatif tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang miskin.

METODA PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di UED-SP Buluhcina Mandiri desa Buluhcina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada bulan April 2010 hingga bulan Agustus 2010. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat pemanfaat bantuan dana usaha ekonomi desa-simpan pinjam (UED-SP) di desa Buluhcina. Proses penentuan dan pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah secara (*Purposive Sampling*), yang kemudian diperoleh 13 orang pemanfaat program dana yang lancar pengembaliannya, dan 4 orang pemanfaat program yang mengalami kemacetan pengembalian dananya.

Pengumpulan data melalui teknik wawancara (kuesioner, catatan lapangan dan dokumentasi). Kemudian, data dianalisa dan diinterpretasikan secara kualitatif.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam perspektif Sosiologi Lembaga sosial menurut Alvin L. Bertrand, adalah kumpulan-kumpulan dari norma-norma sosial (struktur-sosial) yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia dalam kelompok yang dinamakan asosiasi. Apabila beberapa masyarakat melaksanakan aktivitas dalam mencapai tujuan dapat dilakukan melalui organisasi informal dan organisasi formal. Organisasi informal yaitu mereka bekerja secara implisit tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu atau tidak diakui secara hukum.

Max Weber mengembangkan teori birokrasi, organisasi-organisasi yang dibentuk menurut cara-cara birokrasi mempunyai ciri sebagai berikut :

1. Tugas-tugas organisasi didistribusikan dalam beberapa posisi yang merupakan tugas-tugas jabatan. Secara implisit terjadi pembagian kerja sehingga terjadi spesialisasi. Spesialisasi meningkatkan keahlian staf dan organisasi akan mampu mengembangkan struktur kepegawaian berdasarkan kualifikasi teknis.
2. Posisi-posisi dalam organisasi terdiri dari hierarki struktur wewenang. Hierarki berwujud sebagai piramida dimana setiap jabatan bertanggung jawab terhadap bawahan mengenai keputusan dan pelaksanaan. Tanggung jawab atasan membawahi bawahan-bawahannya yang melingkupi bagian-bagian tersebut.
3. Suatu sistem peraturan menguasai keputusan-keputusan dan pelaksanaan organisasi administratif melibatkan aplikasi peraturan-peraturan umum terhadap kasus-kasus khusus. Peraturan-peraturan tersebut menjamin keseragaman pelaksanaan dan dengan kerja sama berbagai struktur berwenang, koordinasi pelbagai kegiatan dapat dilakukan. Organisasi juga menyelenggarakan kesinambungan operasi yang dikaitkan dengan perubahan personalia. Dengan demikian, terjadi stabilitas, kelemahan, atau kekurangan tipe-tipe kelompok atau kolektivisasi dapat diatasi seperti gerak sosial.
4. Unsur staf yang merupakan pejabat bertugas memelihara organisasi dan khususnya keteraturan komunikasi. lapisan petugas administratif terdiri dari

pegawai-pegawai yang bertanggung jawab mengawasi rekaman tertulis dan pelaksanaan. Kerja staf produksi mempunyai saham atau peranan didalam mengembangkan tujuan organisasi Para pejabat berharap bahwa hubungan dengan bawahan dan pihak lain bersifat orientasi impersonal. Dengan demikian pejabat akan mampu menetralkan unsur subjektif dan kepentingan pribadi. Jarak jauh antara pejabat dan bawahan harus mengembangkan formalitas. Ikatan-ikatan impersonal harus berfungsi mencegah terjadinya perasaan pribadi yang menurunkan kualitas keputusan-keputusan rasional.

Penyelenggaraan kepegawaian didasarkan pada karier, Kepegawaian ditekankan pada kualifikasi teknis ketimbang faktor-faktor politik, kekerabatan, atau hubungan-hubungan pribadi dan koneksi. Taraf kualifikasi teknis didasarkan pada pola pengujian yang diakitkan dengan taraf pendidikan formal. ciri-ciri birokrasi yang merupakan organisasi, menurut Max Weber. Kriteria fungsi didasarkan pada berfikir rasional dan pelaksanaan administratif yang efisien. Pelaksanaan efektif didasarkan pada pembagian pertanggungjawaban spesialisasi dan pemabgian kerja.

Masyarakat adalah makhluk sosial yang memerlukan lingkungan sosial. dalam menjalankan aktivitas di birokrasi sosialisasi sangat diperlukan. Ritcher Jr (1987:139) dalam Paul B. Horton & Chester L. Hunt (1987 : 89) berpendapat bahwa sosialisasi adalah proses seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukannya agar dapat berfungsi sebagai orang dewasa dan sekaligus sebagai pemeran aktif dalam satu kedudukan atau peranan tertentu dimasyarakatnya. Teori pertukaran Homans itu bertumpu pada asumsi bahwa orang terlibat dalam perilaku untuk memperoleh ganjaran atau menghindari hukuman. Pertukaran perilaku untuk memperoleh ganjaran adalah prinsip dasar dalam transaksi ekonomi sederhana (Homans, dalam Poloma, 2007 : 59)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Aplikasi Pelaksanaan Program

Menurut Max Weber para pejabat berharap bahwa hubungan dengan bawahan dan pihak lain bersifat orientasi impersonal. Dengan demikian pejabat akan ampu menetralkan unsur subjektif dan kepentingan pribadi. Jarak jauh antara pejabat dan bawahan harus bersifat formalitas. Ikatan-ikatan impersonal harus berfungsi mencegah terjadinya perasaan pribadi yang menurunkan kualitas keputusan-keputusan rasional.

Pemberian bantuan UED-SP Buluhcina Mandiri haruslah tepat sasaran tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok diatas kepentingan masyarakat yang layak mendapatkan bantuan pinjaman dana UED-SP Buluhcina Mandiri sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara yang diharapkan dengan kenyataan yang terjadi dilapangan.

Karakteristik pemberian bantuan UED-SP Buluhcina Mandiri dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Distribusi Responden yang Lancar Pengembalian Dana UED-SP
Berdasarkan Karakteristik Pemberian Bantuan UED-SP

No	Karakteristik	Jumlah	Persentase (100%)
1	Miskin	5	38
2	Kerabat	-	-
3	Teman	-	-
4	Tidak melihat kaya dan miskin	8	62
Jumlah		13	100

Sumber: Data Lapangan, 2010

Tabel diatas menerangkan bahwa 5 responden (38%) pemanfaat UED-SP berasal dari responden miskin, 8 orang responden atau (62%) pemberian bantuan UED-SP tidak melihat dari kalangan masyarakat berekonomi kaya dan miskin.

Trasparansi atau keterbukaan pemberian dan bantuan UED-SP sudah diketahui oleh masyarakat bahwa program tersebut ditujukan untuk masyarakat yang

memiliki ekonomi lemah dan memiliki usaha untuk dikembangkan serta memiliki agunan, namun bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki agunan dan usaha tidak dapat memanfaatkan jasa UED-SP karena menurut responden secara individu saja tidak memiliki keinginan untuk berkembang sehingga apabila tetap diberikan dana pinjaman tanpa agunan dan usaha maka akan dikhawatirkan pengembalian dana UED-SP akan banyak mengalami kemacetan. Sehingga dana tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat yang memiliki ekonomi tinggi asal memiliki usaha dan agunan.

Sosialisasi yang Dilakukan oleh Aparat Birokrasi UED-SP menurut Responden yang Lancar dalam Pelaksanaan UED-SP

Menurut Ritcher Jr (1987 : 139) berpendapat bahwa sosialisasi adalah proses seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukannya agar dapat berfungsi sebagai orang dewasa dan sekaligus sebagai pemeran aktif dalam satu kedudukan atau peranan tertentu dimasyarakatnya. Seluruh responden mengatakan terdapat sosialisasi yang telah dilakukan oleh UED-SP Buluhcina, Sosialisasi dilakukan disetiap dusun yang ada di desa Buluhcina dengan memberikan undangan kepada Kepala Dusun dan selanjutnya Kepala Dusun mengumumkan kepada masyarakat tentang keberadaan UED-SP Buluhcina Mandiri

Agunan dan Manfaat bagi Responden yang Lancar dalam Pelaksanaan UED-SP

Agunan merupakan jaminan yang digunakan oleh responden untuk memenuhi persyaratan menjadi anggota UED-SP, jumlah agunan yang diberikan menjadi pertimbangan oleh aparat UED-SP untuk menentukan jumlah dana yang dapat diberikan pinjaman. Data dari pengamatan menunjukkan bahwa 4 responden atau (31%) menggunakan agunan berupa Surat Bukti Pemilikan Sepeda Motor (BPKB), Dominan agunan yang digunakan oleh responden adalah surat tanah yakni 8 responden atau (61%), dan 1 responden (8%) menggunakan agunan dalam 2 bentuk yakni berupa surat tanah dan sepeda motor.

Dalam hal besarnya pinjaman oleh masyarakat, diperoleh data bahwa 1 orang (8%) responden menerima dana UED-SP sebesar kurang dari Rp 5.000.000,- dan yang dominan menerima dana pinjaman sebesar Rp 5.000.00,- hingga Rp 10.000.00,- serta peminjaman diatas Rp 10.000.000 belum terdapat di UED-SP Buluhcina Mandiri. Jumlah dana tersebut berdasarkan agunan yang telah ditetapkan oleh tim verifikasi UED-SP.

Dana yang telah diterima oleh responden berdasarkan dari agunan yang di serahkan di UED-SP berdasarkan hasil dari tim verifikasi. Kegunaan dana UED-SP oleh pemanfaat yang lancar dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

**Distribusi Responden yang Lancar Pengembalian Dana UED-SP
Berdasarkan Kegunaan pinjaman UED-SP**

No	Kegunaan	Jumlah	Persentase (100%)
1	Hewan ternak	1	8
2	Peralatan Rumah tangga	-	-
3	Perdagangan Ikan	6	46
4	Penjualan barang Harian	4	31
5	Dan lain-lain	2	15
Jumlah		13	100

Sumber: Data Lapangan, 2010

Tabel diatas menunjukkan bahwa kegunaan dana UED-SP dominan digunakan untuk perdagangan ikan yang berjumlah 6 responden (46%), penjualan barang harian 4 orang (31%), Hewan ternak 1 orang (8 %), dan digunakan untuk berbagai keperluan sebanyak 2 orang (15%), kegunaan campuran tersebut digunakan untuk biaya pendidikan anak yang sedang sekolah dan digunakan oleh satu nama peminjam di UED-SP tetapi untuk 3 orang dengan berbagai kebutuhan yakni, biaya tambahan pembangunan rumah, biaya untuk perdagangan ikan dan biaya untuk pindah dari Pontianak ke desa Buluhcina Mandiri.

Broom & Selznic (1961:79) dalam Paul B.Horton & Chester L.Hunt (1987:89) menyatakan bahwa sosialisasi adalah proses membangun atau menanamkan nilai-

nilai kelompok pada diri seseorang. dengan adanya sosialisasi untuk memberikan motivasi dari aparat UED-SP kepada masyarakat untuk memanfaatkan dana UED-SP dengan sebaik-baiknya diharapkan masyarakat dapat mewujudkan harapannya untuk pengembangan usaha di bidang ekonomi. Dari data di lapangan diperoleh bahwa 77% responden yang tidak pernah macet dalam pembayaran UED-SP Buluhciana Mandiri mengalami kemajuan usaha, dan 23% mengalami perkembangan usaha yang biasa-biasa saja dan tidak membawa perubahan yang terlalu dirasakan dengan keberadaan UED-SP.

Tingkat pendapatan tertentu akan mempengaruhi responden untuk termotivasi bekerja, hal ini disebabkan karena tujuan dari pekerjaan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tingkat pendapatan responden dalam 1 bulan yang memiliki pendapatan terendah adalah kurang dari Rp 2.000.000,- terdapat sebanyak 8 orang atau 62%, untuk pendapatan sedang Rp 2.000.000- Rp 5.000.000,- terdapat 4 orang (31%), dan 1 orang atau sebesar 8% berpendapatan tinggi berjumlah lebih dari Rp 5.000.000,- perbulan.

Jika dilihat dari pendapatan responden dalam satu bulan tidak dapat dijadikan patokan yang menentu karena responden yang lancar dalam pengembalian dana UED-SP memiliki pekerjaan sebagai wirausaha yang penghasilannya ditentukan oleh cuaca dan selera konsumen. Sehingga pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaannya dalam satu bulan tidak sama. Bahkan terkadang terdapat pada 1 bulan responden yang lancar pengembalian yang mendapatkan pendapatan yang besar dan terkadang mendapatkan pendapatan yang menurun daripada bulan yang lainnya.

Menurut Max Weber birokrasi merupakan suatu organisasi didalam masyarakat sehingga tidak boleh menyimpang dasar-dasar dimana masyarakat itu berada. Perbuatan yang tidak menyimpang dari norma-norma yang ada maka kendala-kendala tidak akan terdapat dalam pelaksanaannya, namun kenyataan tidak sesuai antara keinginan dan harapan.

Sebanyak 11 orang (85%) responden yang lancar dalam pengembalian dana UED-SP tidak mengalami kendala dari responden dan pemerintah, 2

orang responden (15%) mengalami kendala dari responden sendiri dan tidak ada yang mengalami kendala dari aparat UED-SP.

Responden yang dominan yang tidak memiliki kendala menjawab bahwa pelayanan yang dilakukan oleh aparat UED-SP sudah baik dan ramah kepada masyarakat, Sedangkan kendala dari responden yang lancar dalam pengembalian dana UED-SP disebabkan karena kurangnya manajemen pengembangan usaha dan kendala dari responden lain disebabkan karena meminjam dana atas 1 orang namun setelah mendapat pinjaman dana UED-SP dibagi untuk 3 orang, meskipun ditemukan beberapa kendala masyarakat tetap berusaha untuk mencari alternatif untuk melakukan pengembalian dana di UED-SP.

Pemanfaat UED-SP yang Mengalami Keterlambatan dalam Pengembalian Dana UED-SP (*Off Target*)

Pedagang Barang Harian

Ernawati adalah salah satu pemanfaat dana UED-SP yang mulai memanfaatkan dana UED-SP pada tahun 2009, dengan jumlah pinjaman awal dana sebesar Rp 5.000.000,00. Responden telah berumur 35 tahun dan memiliki jumlah tanggungan 5 orang dalam keluarganya. Meskipun hanya berpendidikan hingga Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah tanggungan keluarga tersebut ia termotivasi bekerja untuk memperoleh penambahan perekonomian dalam keluarga dengan cara berdagang barang harian di depan rumahnya.

Tindakan perilaku sosial yang dimaksudkan oleh Homans adalah tindakan yang berkenaan dengan suatu kemauan yang mengakibatkan adanya suatu ganjaran dan hukuman dari orang lain (Homans, dalam Irving M. Zeitlin, 1998 : 97). Kehadiran UED-SP memberikan manfaat dan adanya hukuman yang diberikan oleh pengelola UED-SP apabila tidak dapat melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh UED-SP Buluhcina Mandiri.

Responden mendapatkan dana bantuan UED-SP karena beranggapan tergolong keluarga yang membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya, Ia menggunakan agunan berupa sebidang tanah yang ditanami tanaman karet. Jumlah pinjaman dana sebesar Rp 5.000.000,00 yang telah ditetapkan oleh pengelola UED-SP dari hasil tim verifikasi berdasarkan usaha dan agunan yang diserahkan responden ke UED-SP.

Namun dalam pelaksanaan setelah bergabung menjadi anggota UED-SP responden mengalami kendala dalam pengembalian dana hingga bulan Juni tahun 2010 telah mengalami kemacetan selama 4 bulan yang dikenakan denda sebesar Rp 450.000,00. Faktor penyebab kendala yang dialami responden dapat diketahui dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Dana yang diperoleh di UED-SP berjumlah Rp 5.000.000,00 namun dana tersebut digunakan berdua dengan Ibu, saya menggunakan dana UED-SP berjumlah Rp 2.000.000,00 sedangkan Rp 3.000.000,00 digunakan oleh Ibu. Setelah Ibu saya meninggal dunia karena mengalami sakit, tanggungan pengembalian dana ke UED-SP di tanggung sendiri, 1 bulan setelah Ibu saya meninggal disusul kemudian meninggalnya adik laki-laki saya yang juga disebabkan oleh penyakit yang dialaminya, menjelang beberapa bulan kemudian suami yang mengalami sakit sehingga di bawa berobat hingga ke Kabupaten Rohul, sehingga dana UED-SP tidak lagi digunakan sepenuhnya untuk tujuan awal yakni pengembangan dana usaha namun digunakan untuk mengobati keluarga yang mengalami musibah penyakit”.

Kendala yang dihadapi responden tersebut belum mampu diatasi hingga batas pengembalian dana ke UED-SP yang harus dikembalikan setiap tanggal 10 perbulannya, sehingga mendapatkan hukuman berupa sanksi dari pihak UED-SP.

“Sanksi yang diberikan oleh pengelola UED-SP adalah penyitaan agunan tanah yang ditanami tanaman karet yang diserahkan ke UED-SP, sebelumnya saya mendapat surat peringatan dari pengelola UED-SP sebanyak 3 kali yang ramai datang kerumah menanyakan tentang pengembalian dana UED-S.”

Pedagang Ikan

Amiruddin memanfaatkan dana UED-SP mulai tahun 2009 dalam jangka waktu 18 bulan. Pertama kali mendapatkan informasi tentang keberadaan UED-SP dari para pengelola UED-SP yang mengundang masyarakat Buluhcina untuk melakukan pertemuan di kantor UED-SP dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat yang memiliki keinginan menggunakan modal di UED-SP untuk digunakan sebagai pengembangan usaha.

Responden meminjam dana ke UED-SP berjumlah Rp 5.000.000,00 berdasarkan keputusan dari pengelola. Pada awalnya ia mengajukan permohonan peminjaman dana sebesar Rp 10.000.000,00 namun karena melihat agunan berupa sebidang tanah yang ditanami 85 batang sawit yang baru berbuah pasir dan menggunakan BPKB serta melihat usaha yang ditekuni responden sebagai pedagang ikan tim verifikasi hanya memberikan pinjaman dengan jumlah tersebut.

Responden mengalami kemacetan dalam pengembalian dana ke UED-SP dalam jangka waktu 6 bulan dengan jumlah denda Rp 895.000,00. Pekerjaan yang dilakukannya sebagai pedagang ikan kepada pengencer ikan di pasar dijual secara tunai dan kadang pedagang ikan berhutang kepada responden memperoleh pendapatan sebesar Rp 1.500.000,00 - Rp 2.000.000,00. Pendapatan tersebut tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman ke UED-SP karena selain membayar ke UED-SP responden juga menanggung beban sebagai Kepala Keluarga yang mencari nafkah untuk mencukupi kehidupan sehari-hari dan membiayai ke 4 orang anaknya yang masih duduk di jenjang bangku pendidikan yakni, SLTA, SLTP, SD dan TK sehingga kemacetanpun dialaminya.

Meskipun responden berpandangan dari hasil keputusan yang telah ditetapkan oleh pihak pengelola UED-SP tentang nilai agunan dengan jumlah pinjaman yang tidak adil didapatkan, responden tetap menerima jumlah dana tersebut karena kebutuhan untuk peminjaman modal pengembangan usaha.

Pedagang Kayu

Dakrun yang berumur 46 tahun menekuni pekerjaan sebagai pedagang kayu dan pedagang ikan memiliki 6 orang tanggungan dalam keluarga. Pertama kali memanfaatkan dana UED-SP dimulai pada tahun 2009 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 10.000.000,00 jumlah dana tersebut berdasarkan keputusan pengelola UED-SP yang digunakan sepenuhnya oleh Istrinya untuk modal menjual pakaian secara kredit kepada masyarakat yang berada di desa Buluhcina dan desa tetangganya, agunan yang digunakan adalah surat tanah yang seluas $\frac{1}{4}$ Ha dan BPKB, ia merasakan manfaat yang diperoleh dari UED-SP Buluhcina Mandiri

Kendala dalam pelaksanaan UED-SP yang dihadapi responden adalah keterlambatan pelanggan pakaian yang mengambil pakaian secara kredit kepada istrinya bertepatan juga dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai uang semester anaknya berjumlah Rp 3.000.000,00 yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Tabrani.

Keterlambatan pengembalian dana di UED-SP selama 5 bulan dengan jumlah denda sebesar Rp 940.000.00. Pemberian surat peringatan telah diberikan oleh pihak UED-SP Buluhcina Mandiri kepada responden bertujuan untuk memberi arahan tentang pengembalian dana ke UED-SP. Surat peringatan tersebut diantarkan langsung ke rumah responden oleh pengelola UED-SP.

Petani

Mujiono telah 15 tahun tinggal di desa Buluhcina, pria yang bersuku Jawa ini memiliki jumlah tanggungan dalam keluarga 4 orang bertempat tinggal di dusun 3 sekaligus menjabat sebagai Kepala Dusun. Responden merasakan manfaat dari keberadaan UED-SP seperti yang diungkapkannya. Di desa Buluhcina terdapat 4 dusun. Sosialisasi UED-SP dilakukan di setiap dusun masing-masing dan kriteria pemberian dana bantuan tidak melihat stratifikasi masyarakat yang berekonomi kaya atau miskin yang penting memiliki agunan dan sesuai dengan keputusan tim verifikasi.

Mujiono mulai memanfaatkan dana UED-SP Buluhcina Mandiri pada tahun 2009 dengan jumlah pinjaman dana sebesar Rp 8.000.000,00. Dana tersebut digunakan untuk modal usaha usaha sebesar Rp 4.000.000,00 dan kakaknya sebesar Rp 1.000.000,00 serta digunakan oleh beliau sebesar Rp 3.000.000,00. Hasil wawancara dengan responden :

“Ketika terjadi banjir tanaman yang ditanami digenangi air, karena terletak di daratan rendah sehingga menyebabkan gagal panen, karena tidak memiliki modal kembali saya tidak dapat mengolah kebun lagi dan pekerjaan saya sekarang adalah bekerja membersihkan kebun orang dan mencari ikan di sungai.”

Sanksi yang di berikan oleh UED-SP hingga Bulan Juni 2010 adalah memberikan denda sebesar Rp 1.200.000,00 karena mengalami keterlambatan selama 6 bulan, setiap harinya ia di kenakan sanksi Rp 8.000,00 perhari. Meskipun gagal panen dan meyebabkan keterlambatan untuk pengembalian dana ke UED-SP denda tidak hanya ditanggung seorang diri namun juga ditanggung oleh keluarga lainnya karena dana tersebut dipakai untuk keperluan bersama.

KESIMPULAN

Pelaksanaan UED-SP Buluhcina Mandiri pada bulan Juni tahun 2010 berjumlah 90 orang. Dari 90 pemanfaat UED-SP sebanyak 78 (87%) pemanfaat dalam pelaksanaannya berjalan dengan lancar untuk pengembalian dana UED-SP dan pemanfaat yang mengalami *off target* atau keterlambatan dalam pengembalian dana karena berbagai alasan berjumlah 12 orang (13%), misalnya responden yang menggunakan satu nama namun dalam penggunaannya digunakan untuk 2 orang dialami oleh responden yang bekerja sebagai tukang kayu. Dana dari UED-SP diberikan kepada sang istri untuk berwirausaha penjualan kain secara kredit kepada masyarakat di Kecamatan Siak Hulu, barang dagangan yang dijual secara anggsuran kepada konsumennya mengalami kemacetan dengan alasan tidak memiliki uang

sehingga juga berakibat kepada istri responden mengalami kegagalan dalam berwirausaha serta harus mengeluarkan biaya untuk kebutuhan anaknya yang sedang menempuh pendidikan di niversitas. Dengan macetnya usaha yang dilakukan istri responden juga menyebabkan kemacetan dalam pengembalian dana di UED-SP.

Bencana alam dan banjir dialami oleh responden yang bekerja sebagai petani tanaman palawija, seperti sayur, cabe, kacang-kacangan dan sebagainya, kendala disebabkan banjir mengenai tanah kebun responden yang memiliki dataran rendah sehingga menyebabkan tanaman responden gagal panen, dan off targetpun menimpa responden. Responden ke 4 yang memiliki pekerjaan sebagai penjual ikan mengalami *off target* disebabkan oleh rekan kerjanya yakni para pedagang enceran yang berjualan di pasar-pasar mengambil barang kepada responden secara kredit sehingga ketika terjadi kemacetan pembayaran dari rekan kerjanya sesama pedagang ikan serta dana yang digunakan untuk penegmbangan usaha digunakan oleh temannya sehingga berakibat kepada responden dan mengakibatkan responden mengalami kemacetan dalam pengembalian dana UED-SP.